

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KEPADATAN
PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI
PULAU JAWA TAHUN 2013-2017**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh :

SYAFIQ LIM
B300130113

**PROGRAM ILMU STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KEPADATAN
PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI
PULAU JAWA TAHUN 2013-2017**

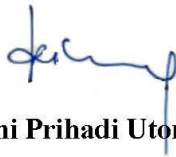
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

SYAFIQ LIM
B300130113

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Drs. Yuni Prihadi Utomo.,MM.

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI PULAU JAWA TAHUN 2013-2017

Oleh :
SYAFIQ LIM
B300130113

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Kamis, 28 Januari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Drs. Yuni Prihadi Utomo.,MM.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Siti Fatimah Nurhayati, SE.M.Si.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Muhammad Anas, SE. M.Si.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, M.M)

NIK/NIDN : 19570217 1986 031 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 28 Januari 2021

Penulis



SYAFIQ LIM
B300130113

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI PULAU JAWA TAHUN 2013-2017

Abstrak

Ketimpangan Antar Wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang terdapat pada masing-masing wilayah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, upah minimum provinsi, kepadatan penduduk terhadap ketimpangan antar wilayah di pulau Jawa tahun 2013-2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder gabungan dari data *cross section* dan data *time series* dari tahun 2013-2017. Data yang digunakan diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan variabel Kepadatan Penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel upah minimum provinsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci : Ketimpangan Antar Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Provinsi, Kepadatan Penduduk.

Abstract

Inequality between regions is a common aspect of economic activity in a region. Inequality was initially caused by differences in the content of natural resources and differences in geographic conditions in each particular region. This study aims to analyze the effect of economic growth on local revenue, provincial minimum wages, population density on inequality between regions on the island of Java in 2013 -2017. The type of data used in this study is combined secondary data from cross section data and time series data from 2013-2017. The data used were obtained from the official website of the Central Statistics Agency (BPS). The analysis method used is panel data regression analysis. The results showed that the variable of local revenue and the variable of Population Density had a significant effect on Inequality between Regions, while the variables of economic growth and the variable of provincial minimum wages had no significant effect.

Keywords: Inequality Between Regions, Economic Growth, Original Local Revenue, Provincial Minimum Wage, Population Density.

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya

perbedaan kandungan demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidak mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*) (Simbolon, 2017). Mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan perdebatan yang panjang. Pada umumnya metode yang digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah dengan menggunakan metode Indeks Williamson. Dalam ilmu statistik, indeks ini adalah *coefficient of variation* yang digunakan untuk mengukur suatu perbedaan.

Menurut Todaro (2004) ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah. Myrdal dalam Jhingan (1990) mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah dikarenakan lebih besarnya dampak balik (*back wash effect*) dibandingkan dampak sebar (*spread effect*) nya. Dampaknya balik berupa perpindahan modal atau investasi menyebabkan ketimpangan semakin besar antara wilayah satu dengan lainnya. Di samping itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di antaranya angkatan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia.

Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi ditimbulkan adalah dalam bentuk

kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketimpangan antar wilayah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan perkapita dan dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan.

2. METODE

Seperti telah disebutkan di muka, alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, upah minimum provinsi, dan jumlah kepadatan penduduk terhadap ketimpangan antar wilayah adalah analisis regresi data panel. Data panel adalah penggabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*). Metode analisis regresi data panel adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik dengan perilaku data yang lebih dinamis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada serta laporan-laporan dari instansi tertentu. Data diperoleh dari berbagai sumber terbitan yang dipublikasikan oleh BPS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks. Data sekunder yang digunakan yaitu gabungan dari data *time series* rentang waktu 2012-2017 dan data *cross section* yang meliputi 6 provinsi di seluruh Pulau Jawa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian dengan melihat laporan tertulis baik berupa angka maupun keterangan (Arikunto, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 4.6, terlihat variabel Pendapatan Asli Daerah dan Kepadatan Penduduk memiliki pengaruh signifikan sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi tidak memiliki pengaruh signifikan.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,080235, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, jika variabel Pendapatan Asli Daerah naik seribu rupiah, maka Ketimpangan Antar Wilayah akan mengalami kenaikan sebesar $0,080235/100 = 0,00080235$. Sebaliknya, jika variabel Pendapatan Asli Daerah turun seribu rupiah, maka Ketimpangan Antar Wilayah akan turun sebesar 0,0008235.

Variabel Kepadatan Penduduk (KP) memiliki koefisiensi regresi sebesar 0,108943, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, bila Kepadatan Penduduk naik 1% maka Ketimpangan Antar Wilayah akan meningkat sebesar $0,108943/100 = 0,00108943$. Sebaliknya, jika Kepadatan Penduduk turun 1%, maka Ketimpangan Antar Wilayah akan turun sebesar 0,00108943.

Nilai konstanta masing-masing Provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.5. Nilai konstanta tertinggi dimiliki Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,030905. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Provinsi dan Kepadatan Penduduk terhadap Ketimpangan Antar Wilayah maka Provinsi Jawa Timur cenderung memiliki Ketimpangan Antar Wilayah yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi lainnya. Sedangkan, nilai konstanta terendah dimiliki Provinsi Jawa Barat sebesar -0,215136. Karena itu, terkait dengan pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kepadatan Penduduk (KP) terhadap Ketimpangan antar Wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki Ketimpangan Antar Wilayah yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

3.2 Interpretasi Ekonomi

Berdasarkan uji validitas pengaruh di muka, diketahui variabel Pendapatan Asli Daerah dan Kepadatan Penduduk memiliki pengaruh signifikan sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di pulau Jawa tahun 2013-2017.

3.3 Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya (Romi, 2018). Berdasarkan hasil estimasi data panel secara cross section menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan Antar wilayah di Pulau Jawa tahun 2013-2017.

Hal ini terjadi disebabkan karena pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa belum terjadi secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi umumnya dirasakan oleh daerah yang masuk dalam kategori kota ataupun memiliki kekayaan alam yang lebih. Perbedaan kepemilikan asset oleh suatu daerah berupa endowment factor yang dimiliki akan mampu menciptakan ketimpangan antar wilayah. Hasil ini juga sesuai dengan hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008) yang mengatakan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Yusica (2018) dalam penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah.

3.4 Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah

Menurut UU No.33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variabel tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). Berdasarkan hasil estimasi data panel secara *cross section* menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di Pulau Jawa tahun 2013-2017.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Inayah (2018) dalam penelitian yang berjudul “Ketimpangan Ekonomi Antar wilayah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah.

3.5 Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan jasa yang telah dilakukan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Lubis (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Upah di Indonesia”. Hasil regresi menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah.

3.6 Kepadatan Penduduk Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan

dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992). Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (Mantra, 2007). Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Naelul (2018). Hasil regresi menunjukkan bahwa Kepadatan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah.

4. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil analisis yang sudah dibahas sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan uji Chow model terestimasi terbaik adalah FEM, sedangkan uji Hausman model terestimasi terbaik adalah REM. Model REM terpilih sebagai model terestimasi terbaik.
- b) Model terestimasi REM eksis, dengan daya ramal (R^2) = 0,221196, artinya 22,1196% variasi Ketimpangan Antar Wilayah dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Provinsi dan Kepadatan penduduk.
- c) Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t), variabel Pendapatan Asli Daerah dan Kepadatan Penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah. Sementara variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Antar Wilayah.
- d) Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh positif terhadap Ketimpangan Antar Wilayah. Sementara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Kepadatan Penduduk berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Antar Wilayah.
- e) Provinsi Jawa Timur memiliki nilai konstanta tertinggi yang artinya terkait dengan pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan

Asli Daerah, Upah Minimum Provinsi, dan Kepadatan Penduduk. Ketimpangan antar Wilayah Jawa Timur cenderung paling tinggi. Sedangkan Provinsi Jawa Barat memiliki nilai konstanta terendah, artinya terkait dengan pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Provinsi, dan Kepadatan Penduduk. Ketimpangan Antar Wilayah, Provinsi Jawa Barat cenderung paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa.

- f) Ketimpangan Antar Wilayah disebabkan oleh ketidakseimbangan Pendapatan Asli Daerah dan Kepadatan Penduduk di setiap Provinsi di Pulau Jawa. Ketimpangan Antar Wilayah di Pulau Jawa, yang dianalisis menggunakan Indeks Wiliamson menunjukan adanya konvergensi. Oleh karna itu salah satu upaya dalam mengatasi Ketimpangan Antar Wilayah adalah dengan memacu pendapatan daerah serta mengurangi kepadatan penduduk di setiap Provinsi di pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2006). *Ketimpangan Wilayah di Antar Wilayah. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Yogyakarta: UNY.
- Astasarietal. (2018). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hasiao, C. (2003). "Analysis of panel data . New York: Cambridge University Press.
- Juanda, Bambang Juardi. 2012. "Ekonometrika deret waktu: teori dan aplikasi ". Bogor, IPB Press.
- Jhingan, M.L., 1990, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaufman, Bruce, 2000, *The Economics of Labor Markets*, Fifth Edition, The Dryden Press, New York.
- Khandker, Haughton Jonathan. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro. (2011). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis. (2019). *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

- Myrdal. (1990). Pengaruh Kepadatan Penduduk dan Upah terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di Jawa.
- NRahayu, Endang Siti. 2010. "Pengembangan Sub Sektor Pertanian Tanaman." *Journal of Rural and Development I*(2).
- Sukirno, Sadono. 2010. "MakroEkonomi Modern". Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada.
- Simon. (2017). *Pengaruh Upah Pertumbuhan Ekonomi dan Ipm terhadap Ketimpangan Wilayah di Jawa Barat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjafrizal. (2008). *Analisis Variabel yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Sirojuzilam. (2005). *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*. Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Sjafrizal. (2012). *Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Wilayah*.
- Winarno. (2015). *Pengaruh PAD dan Kepadatan Penduduk di Jawa Tengah*.